

AKSES  TERBUKA

ARTIKEL

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau

Diterima

12 Maret 2024

Disetujui

7 Juni 2024

Diterbitkan

Juni 2024

DOI

Natural Resource Management Strategy as a Foundation for Inclusive and Sustainable Economic Transformation in the Riau Islands Province

M. Ferdi Septianda

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

 2105010054@student.umrah.ac.id

 082288185181

Abstrak Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat dibutuhkan, dapat dilakukan dengan menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai pondasi. Namun dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketergantungan SDA yang tidak terbarukan, perubahan iklim, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan mencari strategi pengelolaan SDA sebagai pondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepri, ditinjau dari beberapa konsep relevan dan dapat diintegrasikan satu sama lain seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Green Economy* (GE), *Blue Economy* (BE), Ekonomi Kerakyatan (EK). Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik. Sumber data berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen pemerintahan. Penelitian ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, melalui representasi konsep SDGs, Pemerintah dapat Menerapkan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan SDA adil dan inklusif, meminimalisir kerusakan lingkungan, memberikan akses ekonomi berbasis SDA, dan insentif praktik ramah lingkungan. Kedua, melalui representasi konsep GE, dapat dilakukan dengan pemetaan potensi SDA, pengembangan sektor ekonomi berbasis SDA ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemitraan multipihak, pembangunan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi yang ketat. Ketiga, melalui representasi konsep BE, dapat dilakukan Pemetaan dan evaluasi potensi sumber daya laut, promosi investasi dan infrastruktur pendukung, pelibatan masyarakat pesisir, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, prioritas perlindungan ekosistem laut, dan mitigasi dampak lingkungan. Keempat, melalui representasi konsep EK, Pemerintah dapat

melibatkan masyarakat pembuatan kebijakan, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan akses terhadap SDA, dan penegakan regulasi lingkungan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan SDA.

Kata Kunci: Pengelolaan; Sumber daya alam; Transformasi ekonomi

Abstract : Inclusive and sustainable economic transformation in Riau Islands Province (Riau Islands) is significant, it can be done by making natural resources (SDA) as a foundation. However, it faces challenges such as environmental damage, social conflict, and dependence on non-renewable resources. This research aims to find strategies for managing natural resources as a foundation for inclusive and sustainable economic transformation in Riau Islands Province, in terms of several relevant concepts that can be integrated, such as Sustainable Development Goals (SDGs), Green Economy (GE), Blue Economy (BE), and Economic Democracy (EK). The research method used is a qualitative literature study by collecting information from books, scientific articles, and government documents. First, through the concept of SDGs, sustainable development can be implemented by empowering local communities, ensuring equitable and inclusive resource management, minimizing environmental damage, and promoting access to a natural resource-based economy. Second, through the GE concept, sustainable development can be carried out by mapping resource potential, developing environmentally friendly sectors, increasing human resource capacity, developing multi-stakeholder partnerships, building supporting infrastructure, and implementing strict monitoring and evaluation mechanisms. Third, through the BE concept, research focuses on mapping and evaluating marine resources, encouraging investment and infrastructure, involving coastal communities, increasing community capacity through training, prioritizing the protection of marine ecosystems, and mitigating environmental impacts. Fourth, through the representation of the EK concept, the Government can involve the community in policy-making, empowering the local economy, equalizing access to natural resources, and enforcing environmental regulations in maintaining the sustainability of natural resource management.

Keywords: Management; Natural resources; Economic transformation

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki limpahan sumber daya alam (SDA) yang beragam pada tiap daerah, turut temurun dimanfaatkan untuk menyokong perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dengan sokongan SDA menjadi pembuktian bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa berusaha memajukan Indonesia, sehingga fungsi dari hadirnya Pemerintahan dapat terpenuhi yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi-fungsi Pemerintahan tersebut beraspek pada pemenuhan hidup masyarakat agar mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dengan menyediakan akses luas pada masyarakat yang dituangkan dengan ragam program kerja pada tiap sektor (Septianda, 2023). Korelasi antara fungsi- pemerintahan dan SDA sangat erat karena tujuan dari pengelolaan SDA adalah untuk menaikkan taraf perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya akan kemakmuran bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa rakyat Indonesia dijamin kesejahteraannya, SDA dikelola guna memakmurkan rakyat (Sulaiman, 2019). Pemerintah Indonesia berwenang berdasarkan Undang-Undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengarahkan penggunaan, pemanfaatan dan peruntukan SDA (Santoso & Fadholi, 2023). Guna mengoptimalkasinya, harus dilakukan dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana.

SDM adalah agen pembangunan yang memiliki peran besar dalam memberdayakan SDA, membawa kearah yang lebih positif dan produktif (Tariyah, 2020). Namun demikian, muncul paradoks yang memperlihatkan bahwa Indonesia yang kaya akan limpahan SDA seharusnya bisa mandiri justru mengalami kondisi seolah menjadi negara miskin karena ketergantungan dengan negara lain (Lutfillah, 2020). Ketergantungan tersebut tergambar melalui pengelolaan SDA seperti minyak, gas, batubara, dan lainnya, masih kurang dan kerap bergantung pada negara lain maupun perusahaan

asing (Arenawati et al., 2023). Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan SDA harus dapat melakukan pelindungan terhadap SDA tersebut dari aktivitas-aktivitas negara lain yang dapat merugikan Indonesia (Farhani & Chandranegara, 2019). Hal tersebut diperparah dengan dominasi oligarki yang begitu kuat dalam pemanfaatan SDA. Dominasi oligarki terhadap SDA di Indonesia mengacu pada pola kekuasaan yang dikendalikan oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki kontrol kuat atas SDA (Alayubi & Raffludin, 2023). Selain itu globalisasi telah menghilangkan tiap-tiap negara, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi (Widiyono, 2019). Hal tersebut menyebabkan bidang kehidupan bersifat kompetitif dan akan dimenangkan oleh negara yang kuat (Muslimin et al., 2021). Sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi merupakan proses transformasi menyangkut perekonomian suatu negara, masyarakat, serta kelembagaan, diharapkan proses tersebut bergerak ke arah yang lebih modern sesuai dengan tujuan pembangunan suatu negara. Transformasi ekonomi yang berpihak pada kepentingan hidup masyarakat maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan, begitu sebaliknya. Transformasi ekonomi menjadi salah satu prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Rifai et al., 2023). Sejalan dengan hal itu kebijakan moneter Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 memiliki motto “percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, Pemerintah sudah menyusun rangkaian strategi kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan fiskal tahun 2024 yang dibagi menjadi strategi kebijakan fiskal jangka pendek, menengah, serta panjang (Amaria et al., 2024). Indonesia yang memiliki SDA beragam pada tiap daerahnya tentu dapat mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, salah

satunya melalui daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau yang punya kekayaan SDA.

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai corak kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempunyai 2408 pulau besar dan kecil (Mardiansyah et al., 2024). Provinsi Kepri memiliki letak geografis yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam (Retnaningsih & Rosa, 2023). Letak geografis tersebut membuat Provinsi Kepri memiliki peran sentral dalam lalu lintas perdagangan nasional dan internasional, didominasi lalu lintas perdagangan melalui jalur laut. Hal tersebut terjadi karena Provinsi Kepri mempunyai persentase luas lautan dan daratan yang begitu timpang, luas lautan Provinsi Kepri berada diangka 96,79% setara dengan 241.215,3 Km² serta luas daratan yang hanya berkisar diangka 4,21% setara dengan 10.595,41 km². Sejalan dengan itu, Lautan yang begitu luas membuat Provinsi Kepri memiliki potensi besar SDA pada sektor perikanan (Iqbal & Aryawan, 2019). Namun SDA di Provinsi Kepri tidak hanya perikanan, banyak SDA lain di beberapa Kota dan Kabupaten yang se-Provinsi Kepri seperti Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna, Karimun, dan Anambas. SDA di Provinsi Kepri memiliki ragam jenis seperti hortikultura, perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, serta pertambangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 memuat potensi pengembangan wilayah yang menjadi rujukan bagi tiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepri dalam mengelola SDA yang ada, diantaranya kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian yang terbagi menjadi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan perhutanan. Lalu kawasan peruntukan perikanan, pengembangan pola ruangnya terbagi menjadi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan minapolitan, dan pelabuhan perikanan. Selanjutnya kawasan peruntukan pertambangan, seluas 12.343 Hektar

direncanakan untuk kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepri. Potensi pertambangan yang ada di Kepri berupa batu granit di wilayah Kepulauan Anambas, Lingga, Karimun, dan Bintan. Pasir di wilayah Batam, Bintan, Lingga, dan Karimun. Timah di wilayah Lingga dan Karimun. Bauksit di wilayah Bintan, Karimun, dan Lingga. Biji besi di wilayah Kepulauan Anambas, Lingga, dan Karimun. Minyak dan gas bumi di wilayah Kepulauan Anambas dan Natuna, serta potensi pertambangan lainnya. Selanjutnya Kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pemukiman, terakhir pemanfaatan ruang laut yang terbagi menjadi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional, dan alur laut. Pada dasarnya, potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan konsep efisiensi serta potensi ekonomi wilayah adalah langkah penting untuk pembangunan yang terstruktur (Ahyuni et al., 2023).

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri harus diapresiasi. Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun 2023 sebesar 5,20 persen. Angka tersebut tertinggi se-Sumatra dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen. Pengelolaan SDA tentunya berkontribusi dalam mencapai angka tersebut, kendati ada sektor-sektor lain yang menyumbang kontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri. Harapan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan SDA sangat besar, karena tiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepri telah membuktikan bahwa potensi SDA yang dimiliki perlahan mampu mengubah kondisi perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan ekonomi bagi Provinsi Kepri. Namun, dikemudian hari harapan tersebut dalam realisasinya akan mendapatkan tantangan-

tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketergantungan SDA yang tidak terbarukan, perubahan iklim, dan lain-lain. Lebih lanjut, wacana pemisahan Kabupaten Natuna dan Anambas dari Provinsi Kepri untuk selanjutnya dimekarkan menjadi Provinsi Natuna Anambas telah mendapat restu dari Gubernur Provinsi Kepri, Bapak Ansar Ahmad. Terlepas dari dampak positif yang dihasilkan dari pemekaran tersebut, tentu Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri melalui pengelolaan SDA akan sedikit terganggu. Maka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul sekaligus melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepri dibutuhkan strategi berlandaskan konsep yang relevan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu kajian ilmiah yang berakar dari sebuah pola pikir induktif yang mengacu pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena (Harahap, 2020). Studi kepustakaan merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan topik yang tengah dibahas. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan berasal dari buku-buku rujukan serta artikel-artikel ilmiah (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Dalam melakukan penelitian kualitatif bersifat kepustakaan, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan yaitu: Menelusuri sumber data primer dan skunder, Klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data atau pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Multikonsep Pengelolaan SDA

Konsep Pertama, *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan sebuah program lingkup internasional yang berjangka panjang

untuk memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada pada tiap-tiap negara di dunia (Irhamsyah, 2019). Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. Pertama, indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia (*Human Development*), meliputi aspek-aspek seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu, indikator yang terkait dengan lingkungan sekitar (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Terakhir, indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih luas (*Environmental Development*), yaitu ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Mahmudi & Absor, 2023). Konsep kedua, *Green Economy*, merupakan model pembangunan ekonomi yang memprioritaskan kelestarian lingkungan, memberikan manfaat baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka panjang (berkelanjutan), serta berupaya mengurangi kesenjangan agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi mendatang (Firmansyah, 2022). *Green Economy* menjadi sebuah gagasan mutakhir dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan, menekankan pada pendekatan-pendekatan ramah lingkungan atau berwawasan hijau (*green*) yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekologis (Hari Kristianto, 2020).

Konsep ketiga, *Blue Economy* yang merupakan model ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat suatu bangsa, konsep ini mendedikasikan pemanfaatan kekayaan laut bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri, kecuali untuk wilayah regional, serta ekonomi bilateral, dan multilateral (Ramadani & Tatwo, 2023). Prinsip-prinsip dalam *Blue Economy* bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan dan kelautan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya, konsep ini berpijak pada pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan secara komprehensif untuk

mencapai pembangunan nasional yang menyeluruh (Zamroni et al., 2019). Konsep keempat, ekonomi kerakyatan, merupakan sebuah sistem yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, serta sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, secara harfiah dilahirkan para ekonom Indonesia sebagai langkah menggali potensi ekonomi rakyat Indonesia melalui sistem ekonomi alternatif yang sejatinya sudah dijalankan rakyat (Riyadi & Hilyatin, 2021).

Tantangan-tantangan kedepan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, perubahan iklim, harus dihadapi agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, pemekaran Provinsi Natuna Anambas juga menjadi tantangan bagi Provinsi Kepri karena Kabupaten Natuna dan Anambas memiliki SDA-SDA yang selama ini berkontribusi dalam perekonomian Provinsi Kepri. Ketika pemekaran telah disahkan, Pemerintah Provinsi Kepri harus lebih ekstra dalam mengelola SDA-SDA yang ada. Konsep-konsep tersebut dapat menjadi rujukan untuk mengelola segala semua SDA yang ada di Provinsi Kepri sehingga SDA tersebut dapat menjadi pondasi dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Representasi konsep *Sustainable Development Goals*

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan agar dapat menjadi pondasi bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi tersebut. konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat menjadi acuan yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu representasi konsep SDGs dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepri adalah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya-upaya untuk

melestarikan SDA yang ada, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pemanfaatan SDA yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepri dapat merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan SDA, serta memprioritaskan pemanfaatan SDA terbarukan seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan.

Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan SDA. Akses dan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis SDA harus diberikan, serta kapasitas mereka perlu diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan. Selain itu, distribusi manfaat yang adil dari pemanfaatan SDA kepada masyarakat lokal harus dijamin agar tidak terjadi kesenjangan dan konflik sosial. dapat juga mengembangkan ekonomi hijau dan biru yang berpijak pada SDGs. meliputi mendorong pengembangan industri hijau dan biru yang ramah lingkungan, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Investasi dalam teknologi dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau dan biru juga perlu digalakkan, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Insentif dan dukungan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan harus diberikan sebagai bentuk apresiasi.

C. Representasi Konsep *Green Economy*

Membangun transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau dengan berbasiskan pada pengelolaan SDA selaras dengan konsep *green economy* (GE). Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi SDA di setiap kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri. Upaya ini penting untuk mengidentifikasi kekayaan SDA yang dimiliki sebagai modal utama menuju GE. Data dan informasi yang diperoleh akan menjadi dasar bagi perumusan

kebijakan tata kelola SDA secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Kebijakan pembangunan GE ini harus mencakup aspek konservasi SDA, efisiensi pemanfaatan, mitigasi dampak lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta penguatan kelembagaan dan regulasi. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial-ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan. Untuk mengimplementasikannya, perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi berbasis SDA yang ramah lingkungan seperti ekowisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya laut berkelanjutan, pengolahan hasil laut, energi terbarukan, serta industri kreatif dan UMKM dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Penerapan teknologi bersih dan sirkular ekonomi pun menjadi sebuah keharusan.

Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat juga perlu mendapat perhatian khusus. Langkah ini untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam mengelola SDA secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi hijau. Selain memperkuat SDM, kemitraan dan kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat adat/lokal pun harus diupayakan.

Pengembangan infrastruktur pendukung juga menjadi kunci seperti fasilitas pengelolaan limbah, transportasi yang efisien, serta akses terhadap energi terbarukan. Keberadaan infrastruktur ini penting untuk meminimalkan jejak lingkungan dari aktivitas ekonomi berbasis SDA. Pada akhirnya, penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memantau keberhasilan implementasi ekonomi hijau menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan. Indikator-indikator seperti kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus dievaluasi secara berkala.

D. Representasi Konsep *Blue economy*

Provinsi Kepri memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi SDA ini sebagai pondasi untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penerapan strategi "*blue economy*" menjadi kunci. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Melalui pemetaan dan evaluasi yang cermat terhadap potensi sumber daya laut, serta promosi investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi biru, Provinsi Kepri dapat memanfaatkan secara optimal potensi kelautan dan perikanannya.

Pendekatan partisipatif dan inklusif juga penting dalam mengelola sumber daya laut Provinsi Kepri. Diperlukan keterlibatan dari masyarakat lokal, terutama nelayan dan kelompok masyarakat pesisir, dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat dari pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Edukasi dan pelatihan juga harus diberikan secara luas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA. Selain mengedepankan aspek ekonomi, penting juga untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dalam setiap langkah yang diambil. Perlindungan ekosistem laut dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

E. Representasi Konsep Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Provinsi Kepri dapat membentuk forum atau lembaga yang melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat pesisir, dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan SDA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal dapat terakomodasi dengan baik. Program-program pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan SDA secara

berkelanjutan harus diprioritaskan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara memanfaatkan SDA seperti perikanan, perkebunan, dan pertambangan dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan koperasi atau usaha kecil menengah yang berbasis pada pengelolaan SDA.

Selanjutnya, menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan akses dan penguasaan SDA bagi masyarakat. Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang mengatur batas maksimum kepemilikan atau penguasaan SDA oleh individu atau perusahaan, serta memberikan prioritas kepada masyarakat lokal dalam mengakses SDA diwilayahnya. Lalu, memperkuat sistem ekonomi lokal berbasis SDA, Pemerintah dapat mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan menengah yang memanfaatkan sumber SDA lokal, seperti industri pengolahan hasil laut, industri kerajinan berbahan baku dari SDA, dan sebagainya. Hal ini akan mendorong terciptanya rantai ekonomi yang lebih panjang dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Terakhir, memastikan kegiatan pengelolaan SDA tidak merusak lingkungan dan ekosistem. Pemerintah harus menegakkan regulasi dan memberikan pengawasan ketat terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut, hutan, atau wilayah lainnya. Selain itu, pemerintah dapat mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan SDA.

IV. KESIMPULAN

Pertama, melalui *Sustainable Development goals* (SDGs) Pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada dalam SDGs, pemberdayaan masyarakat lokal, memastikan pemanfaatan SDA yang adil dan inklusif, serta mengembangkan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan. Upaya-upaya ini mencakup melestarikan SDA, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, melibatkan

masyarakat lokal, memberikan akses dan peluang ekonomi berbasis SDA, memperkuat kapasitas masyarakat, mendorong investasi dan infrastruktur hijau-biru, serta memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan.

Kedua, melalui *Green Economy*, Pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi SDA, pembangunan kebijakan partisipatif, pengembangan sektor ekonomi berbasis SDA yang ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemitraan dengan berbagai pihak, pengembangan infrastruktur pendukung, dan implementasi mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat menjadi strategi utama yang harus dijalankan.

Ketiga, melalui *Blue Economy*, Pemerintah dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam penerapan konsep tersebut. Upaya yang perlu dilakukan meliputi pemetaan dan evaluasi terhadap potensi sumber daya laut, promosi investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi biru, keterlibatan aktif masyarakat lokal terutama nelayan dan masyarakat pesisir, edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta prioritas pada perlindungan ekosistem laut dan mitigasi dampak lingkungan.

Keempat, melalui ekonomi kerakyatan, Pemerintah dapat melibatkan masyarakat pembuatan kebijakan, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan akses terhadap SDA, dan penegakan regulasi lingkungan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni, S., Lailatul Latipah, S., & Nasarudin. (2023). Strategi pengembangan ekonomi regional dengan pendekatan sectoral economic analysis di provinsi kepulauan Riau. *Economic Military and Geographically Business Review*, 1(1), 19–37.
<https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i1.2023.102>

- Alayubi, S., & Raffludin, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2533–2546. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5513>
- Amaria, A.-Z. H., Hidayatulloh, B., Nugraheni, E., Larasati, E. P., Muslikah, J., Hernawan, K. E., Pratiwi, P. I., & Sevidelicia, T. (2024). ANALYSIS OF THE INTERCONNECTION OF BUDGET POLITICS IN THE 2024 STATE BUDGET DRAFT. *Jurnal Jemtansi*, 1(1), 28–36.
- Arenawati, Pamungkas, B. A., Komariyah, Chandra, N. A., Ramadhaningsih, Pratiwi, D., Mutapadillah, N., Oktavia, W., Hakim, P., Sari, S. P., Thafah, N. Al, Clara, S. R., Abidin, Z., Khatami, S., Hasanah, S. N., Satria, T. A. M., Diyanti, G. A., Harani, S. A., Hudaefah, K. A., ... Marleta, D. S. (2023). *Pro Kontra Isu Pembangunan* (K. S. Nugroho (ed.); Vol. 1, Issue June).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235. <https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.543>
- Harahap, N. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Wal ashri Publishing* (Vol. 59, Issue 1). Wal ashri Publishing.
- Hari Kristianto, A. (2020). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KONSEP GREEN ECONOMY UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>
- Iqbal, M., & Aryawan, W. D. (2019). Desain Kapal Ikan Hibrida Berbahan Dasar High Density Polyethylene sebagai Penunjang Potensi Laut Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.43943>
- Irhamsyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 38, 45–54.
- Lutfillah, N. Q. (2020). Koperasi sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan Indonesia. *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 2(2), 90–98. <https://doi.org/10.34199/oh.2.2.2020.008>
- Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT GUNA REALISASI AGENDA SDGs DAN MENINGKATKAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 802–812. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630>
- Mardiansyah, Y., Rahman, T., Wibowo, S. A., Sapitri, R., Asmarawati, C. I., Prasetyo, A. B., Fahruddini, R. E., & Anggraini, S. putri. (2024). Pelatihan manufaktur komposit hasil limbah laut bagi kelompok pkk untuk meningkatkan keterampilan wirausaha mandiri. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 11(1), 94–98.
- Muslimin, E., Heri, D., & Erihadiana, M. (2021). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*,

- 3(3), 342–349.
<https://doi.org/10.47467/jdi.v3i3.403>
- Ramadani, H., & Tatwo, B. P. (2023). Perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX) Blue Economy Application: Inovasi Blue Economy dalam Mewujudkan Sustainable Sea. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 187–194.
<https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.721>
- Retnaningsih, L. E., & Rosa, N. N. (2023). Pentingnya Pendidikan Kebencanaan Bagi Satuan PAUD di Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Childhood Education*, 7(1), 28–34.
<http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/JCE>
- Rifai, A. Q., Runtunuwu, P. C. H., & Hasyim, A. W. (2023). Kinerja Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) Di Maluku Utara. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* ..., 8(3), 1153–1167.
<http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25013%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/download/25013/11826>
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–56.
- Santoso, B. S., & Fadholi, A. H. (2023). Politik hukum kelembagaan laut yang ideal dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(35), 363–382.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1410>
- Septianda, M. F. (2023). Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Pertambangan Timah Di Pulau Singkep Dilihat Dari Konsep Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Archipelago Barenlitbang*, 2(2), 147–156.
- Sulaiman, S. (2019). EKONOMI INDONESIA: Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Realita. *Jurnal Syariah*, 7(2), 1–17.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan Budaya Membaca di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya). *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 22–33.
<https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33>
- Tariyah, L. (2020). Analisis Potensi Sumber Daya Alam (Sda) Dan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1), 12–21.
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/24/21>
- Zamroni, A., Nurlaili, N., & Witomo, C. M. (2019). Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan Di Kabupaten Lombok Timur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 39.
<https://doi.org/10.15578/marina.v3i2.7388>.